

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Indonesia dan COVID-19

Pandangan Multi Aspek dan Sektoral

KATA PENGANTAR:

Letjen. Doni Monardo

Kepala BNPB dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19

EDITOR:

Fajar B. Hirawan



CSIS INDONESIA
LEADING IN STRATEGIC THINKING

Daftar Isi

Kata Pengantar BNPB	ii
Kata Pengantar CSIS	iii
Daftar Isi.....	v
ASPEK HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN PERBANDINGAN POLITIK.....	1
Dunia di Tengah Pandemi COVID-19: Perspektif Geopolitik.....	2
Multilateralisme PBB dan COVID-19: Pelajaran dari Misi PBB Menangani Krisis Ebola..	7
Kerja Sama ASEAN-China di Masa Pandemi COVID-19	12
Penanggulangan COVID-19: <i>Best Practices</i> dari Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman.....	14
Karantina Wilayah di Filipina: Beberapa Pelajaran Awal untuk Mitigasi COVID-19.....	18
ASPEK KEBIJAKAN SEKTOR DIGITAL DAN PENDATAAN.....	26
COVID-19 Menyingkap Kerentanan Ruang Siber Kita.....	27
Pergerakan Orang di Jakarta Saat Pandemi COVID-19: Analisis Data Facebook <i>Disease Prevention Map</i>	32
Gambaran Mobilitas Penduduk se-Indonesia: Analisis <i>Data Facebook Disease Prevention Map</i>	37
ASPEK PERTAHANAN DAN TATA KELOLA KEAMANAN.....	44
Dampak Politik-Keamanan COVID-19: Urgensi Komunikasi Risiko	45
Prasyarat <i>Lockdown</i> dan Aspek Militer dalam Penanggulangan COVID-19.....	50
Keamanan Kesehatan dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Masa COVID-19: Rekomendasi Awal.....	54
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Masa Pandemi COVID-19.....	58
ASPEK MANAJEMEN KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN.....	64
Karakteristik dan Persebaran COVID-19 di Indonesia: Temuan Awal	65
Urgensi Pembentukan Protokol Multi-Bencana dalam Pandemi COVID-19	77
Antara COVID-19 dan Era <i>Anthropocene</i> : Beberapa Konsekuensi Logis	87

ASPEK EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	92
Ketimpangan Menghambat Pencegahan COVID-19.....	93
Kebijakan Pangan di Masa Pandemi COVID-19	98
<i>Game Theory</i> di Balik Dilema Mudik Lebaran saat Pandemi COVID-19	105
Bagi Negara Tergolong Miskin, Bahaya COVID-19 Baru Mulai Terlihat.....	114
Evaluasi Kegiatan Ekonomi dan Intensitas Penyebaran COVID-19 di Masa New-Normal: Tinjauan atas Beberapa Indikator Cepat.....	117
Menakar Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah.....	125
Tantangan dan Adaptasi Lapangan Kerja di Era Pandemi COVID-19.....	134
Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah COVID-19.....	139
Menuju Database Nasional Pekerja Sektor Informal: Respons atas Pandemi COVID-19 dan Rekomendasi di Masa Depan.....	144
 ASPEK POLITIK	 154
Transparansi, Kolaborasi, dan Resiliensi Kota di Tengah Pandemi COVID-19	155
Mengatasi Rasa Takut dan Membangun Kepercayaan: Bagaimana Emosi Berperan dalam Penanggulangan COVID-19 di Indonesia.....	160
Apakah Virus Seperti COVID-19 Sedang Menginfeksi Demokrasi Indonesia?.....	166
COVID-19 dan Penundaan Pilkada: Masalah dan Jalan Keluarnya	169
COVID-19 dan Penundaan Pilkada Serentak 2020	175
 ASPEK KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPEMERINTAHAN	 179
Pertumbuhan Eksponensial dan Mitigasi COVID-19: Hindari Framing Dikotomis	180
Kepercayaan Terhadap Informasi dari Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19	186
<i>Universal Basic Income</i> di Masa Krisis COVID-19 dengan BLT untuk Semua: Usulan Konkret untuk DKI Jakarta.....	191
Menakar Keberhasilan PSBB dalam Penanganan COVID-19: Data dan Peringatan bagi Pemerintah Daerah	198
Pentingnya Inovasi Kepemimpinan dan <i>Civic Engagement</i> di Daerah dalam Menghadapi COVID-19.....	207

Ketimpangan Menghambat Pencegahan COVID-19

Sudirman Nasir

*Pengajar/ Peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar
Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)*

COVID-19 telah menjadi masalah besar di Indonesia. Penyebaran SARS-CoV-2 meningkat dengan cepat atau mengalami penyebaran eksponensial. Pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga Senin (30 Maret 2020) pukul 12 WIB, menunjukkan ada 1.414 orang positif COVID-19, terdapat 75 orang sembuh, dan 122 orang meninggal. Tingkat kematian atau *case fatality rate* (CFR) di Indonesia mencapai 8,63 persen, lebih tinggi dibandingkan CFR di tingkat global (6,31 persen). Kondisi tersebut menunjukkan sangat perlunya upaya-upaya pencegahan dilakukan secara konsisten oleh masyarakat dan didukung oleh negara. Upaya-upaya pencegahan penting tersebut adalah mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir serta pembatasan jarak sosial atau pembatasan fisik (*social distancing or physical distancing*)

Namun, ketimpangan yang lebar di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemampuan dan konsistensi orang-orang dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Ketimpangan ekonomi kita saat ini terkonfirmasi dari koefisien Gini, koefisien yang menjadi indikator ketimpangan. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa koefisien Gini kita pada September 2019 sebesar 0,38.¹

Kemampuan individu dan kelompok masyarakat dalam melakukan secara konsisten upaya-upaya pencegahan yang sangat penting seperti mencuci tangan dan membatasi jarak sosial atau kontak fisik memang tidak sama. Posisi sosial dan ekonomi mereka sangat mempengaruhi kemampuan menerapkan upaya-upaya pencegahan tersebut. Masyarakat dari kalangan lemah secara sosial dan ekonomi memiliki kemampuan lebih rendah dalam melakukan upaya-upaya pencegahan tersebut secara konsisten.

Ada dua wujud ketimpangan yang menghambat upaya pencegahan COVID-19. *Pertama*, kesenjangan terkait akses pada air bersih yang menghalangi tindakan pencegahan mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir. *Kedua*, kesenjangan terkait masih dominannya sektor informal yang merintangi upaya pencegahan berupa pembatasan jarak sosial/fisik. Tulisan ini secara ringkas akan mengulas kedua wujud ketimpangan tersebut dan pengaruhnya pada upaya-upaya pencegahan COVID-19.

¹ Semakin besar koefisien ini (mendekati angka 1), berarti ketimpangan makin besar.

Akses Terhadap Air Bersih

Kesenjangan terkait ketersediaan dan keterjangkauan air bersih di Indonesia dapat dilihat antara lain lewat data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2019) yang menunjukkan bahwa hanya 76,07 persen penduduk negeri ini yang memiliki akses pada air bersih yang memungkinkan mereka melakukan upaya pencegahan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terdapat pula ketimpangan yang lebar dalam mengakses fasilitas dasar ini, antara kalangan masyarakat dengan status sosial-ekonomi berbeda, maupun antar wilayah seperti antar daerah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan antar wilayah seperti antara Jawa atau Indonesia bagian barat dan di luar Jawa, khususnya wilayah-wilayah di bagian timur Indonesia, juga harus diperhitungkan.

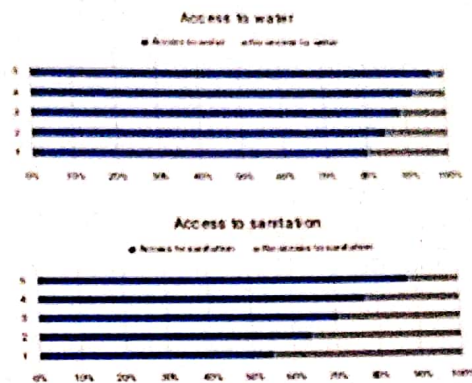
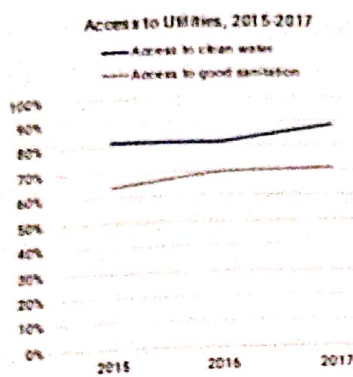
Pada kenyataannya, tak satu pun provinsi di Indonesia bahkan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sekalipun yang mencapai angka 90 persen dalam hal akses pada air bersih. Ketimpangan antar wilayah menjadi makin nyata bila melihat akses pada air bersih di bagian timur Indonesia seperti Papua yang hanya mencapai 35,55 persen, maupun Nusa Tenggara Timur yang baru mencapai 51,92 persen.

Di daerah-daerah di bagian barat Indonesia pun sebenarnya belum semuanya memiliki akses yang memadai pada air bersih. Aceh misalnya baru mencapai 64 persen warganya yang memiliki akses teratur pada air bersih. Singkat kata, akses pada air bersih yang memungkinkan melakukan upaya pencegahan penyakit-penyakit infeksi (termasuk COVID-19) masih merupakan kemewahan bagi banyak warga di daerah-daerah di atas.

Sebuah rumah tangga miskin di Jakarta misalnya, yang terdiri atas 4 atau 5 anggota keluarga dengan pendapatan rata-rata hanya Rp3,36 juta setiap bulan, jelas akan terpaksa mengeluarkan dana besar untuk air bersih yang akan sangat membebani keluarga itu. Hasil penelitian Amrta Institute for Water Literacy menunjukkan bahwa rumah-rumah tangga miskin di Jakarta rata-rata mengeluarkan biaya sebesar Rp360.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka.

Rumah tangga rentan seperti ini tentu saja memiliki beban berat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa air minum yang bersih, sehat dan aman serta upaya pencegahan dasar seperti mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir. Kondisi tersebut membuat mereka juga rawan untuk menderita aneka penyakit infeksi, termasuk infeksi SARS-CoV-2. Kalangan miskin yang memiliki kerentanan dalam akses pada air bersih tentu saja bukan hanya ada di Jakarta atau daerah perkotaan saja, namun juga di luar Jakarta dan Jawa serta di wilayah-wilayah pedesaan, wilayah-wilayah terpencil di banyak pulau di Indonesia.

Penduduk miskin memiliki akses ke air bersih dan sanitasi baik yang relatif rendah.



Meskipun terjadi peningkatan selama beberapa tahun, akses terhadap air dan sanitasi masih kurang memadai.

Selain itu, penduduk miskin memiliki akses yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk di kuilima pengeluar an yang lebih tinggi.

Sumber: BPS dan 2017, 2016, 2015

Kondisi di atas juga mengonfirmasi hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia (RISKESDAS, 2018) di mana masyarakat kita mengalami beban ganda penyakit (*double burden of diseases*). Situasi ketika penyakit-penyakit tidak menular semakin menonjol, namun pada saat yang sama penyakit-penyakit menular (infeksi) seperti infeksi saluran cerna dan infeksi saluran napas juga masih besar. Banyak penelitian kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa upaya konsisten pencegahan berupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir menyumbang sekitar 40 persen bagi penurunan kejadian penyakit-penyakit menular.

Keadaan di atas menunjukkan pula bahwa pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor enam yang memiliki standar keberhasilannya yang sangat tinggi yakni "akses terhadap air bersih dan sanitasi layak tidak hanya cukup bersifat merata, melainkan harus juga bersifat universal, aman dan terjangkau" masih memiliki banyak kendala.

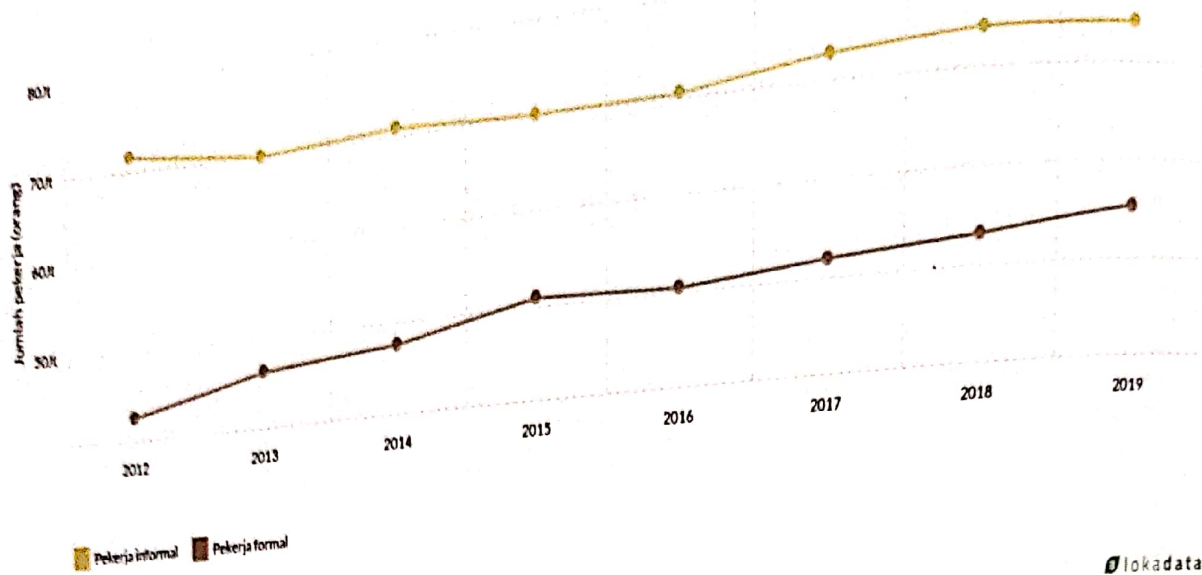
Pelajaran dari pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan, investasi dan program penyediaan dan peningkatan akses masyarakat pada air bersih dan pendidikan atau promosi kesehatan mengenai pentingnya tindakan pencegahan primer, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sangat strategis. Keuntungannya bukan saja bagi pencegahan penyakit, tetapi juga bagi peningkatan kualitas hidup dan martabat manusia dan bangsa.

Sektor Informal dan Pembatasan Jarak Sosial

Wajah ketimpangan lainnya yang turut pula menghambat upaya pencegahan COVID-19 yakni pembatasan jarak sosial atau pembatasan interaksi fisik adalah kenyataan masih banyaknya warga kita yang bekerja di sektor informal. Data BPS pada 2019 lalu menunjukkan terdapat sekitar 57 persen warga negara Indonesia yang bekerja di sektor informal, tanpa kepastian perlindungan dan pendapatan. Para pekerja di sektor informal tentu mengalami banyak kendala dalam menerapkan pembatasan jarak sosial/fisik karena umumnya mereka membutuhkan kontak langsung dengan pelanggannya dan tidak memiliki cukup tabungan untuk berdiam di dalam rumah seperti dianjurkan pemerintah. Banyak di antara mereka yang bekerja demi mencari penghasilan untuk makan dan minum pada hari itu.

Jumlah pekerja formal dan informal, 2012-2019

Data Tahun Februari



Sumber: Survei RPS

lokadata
Data Berbasis IT

Presiden Joko Widodo pada 30/03/2020 telah menyatakan memilih langkah atau kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota demi mengatasi penyebaran COVID-19 yang semakin masif. Sejumlah kalangan telah mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian dan bantuan khusus pada kalangan masyarakat rentan seperti para pekerja di sektor informal ini. Pemenuhan kebutuhan dasar mereka (terutama bahan pangan dan air bersih) selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar itu menjadi sangat penting.

Tanpa dukungan pemerintah atau negara pada kalangan rentan seperti para pekerja di sektor informal, besar kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan pada kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut. Apabila pemerintah atau negara tidak mampu menyediakan dukungan minimal bagi kebutuhan dasar mereka seperti disebutkan di atas, kemungkinan sangat besar mereka akan mencari dukungan informal dari kerabat mereka di daerah asal mereka. Mudiknya banyak pekerja sektor informal di Jakarta ke berbagai daerah di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur belakangan ini adalah bagian dari mekanisme bertahan (*coping strategies*) kalangan rentan para pekerja di sektor informal ini.

Ketimpangan dan Kesehatan

Hubungan ketimpangan dan kesehatan masyarakat memang telah menjadi kajian banyak peneliti dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dalam laporan *Does Income Inequality Cause Health and Social Problems?* (2011), Karen Rowlingson menganalisis hasil-hasil penelitian yang menelaah hubungan kesenjangan ekonomi dengan kondisi kesehatan. Ia tegas menyimpulkan bahwa, meskipun tidak bersifat kausal, sulit diingkari adanya korelasi di antara keduanya.

Tulisan Wilkinson dan Pickett, *The Spirit Level: Why More Equal Society Almost Always Do Better* (2009) dan *Income Inequality and Social Disjunction* (2009), menunjukkan indikator-indikator kesehatan dan sosial, seperti usia harapan hidup, angka kematian ibu dan anak, dan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, ataupun indikator-indikator kejadian depresi dan gangguan kesehatan mental, tingkat ketergantungan pada alkohol dan narkotik, kehamilan remaja dan angka kekerasan, hampir selalu lebih baik di negara-negara dan masyarakat yang lebih rendah tingkat

kesenjangan ekonominya. Negara itu antara lain adalah Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Belanda, Belgia, Jerman, Jepang, Kanada, Australia dan Selandia Baru.

Sampai hari ini memang masih berlangsung debat mengenai argumentasi-argumentasi Wilkinson dan Picket. Namun, *review* Rowlingson antara lain menyimpulkan bahwa sebagian besar argumentasi Wilkinson dan Picket sah. Rowlingson juga mengingatkan kesepakatan banyak peneliti di bidang kesehatan masyarakat bahwa koefisien Gini 0,3 ke atas semakin terbukti memiliki dampak merugikan terhadap kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat.

Koefisien Gini Indonesia kini masih cukup jauh di atas 0,3 sehingga seharusnya mendapatkan perhatian serius. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup manusia dan bangsa Indonesia sulit tercapai jika kita tidak melakukan langkah-langkah terkoordinasi dan nyata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pandemi COVID-19 turut memberi pelajaran bagi kita betapa pentingnya mengurangi ketimpangan itu.

Sudah lebih dari enam bulan sejak ditemukannya kasus pertama di awal bulan Maret 2020, Indonesia bergelut dengan wabah virus korona atau sering disebut COVID-19. Penyebaran virus ini secara nasional maupun global semakin mengkhawatirkan. Bahkan, di beberapa negara, yang pada awalnya dianggap telah sukses dalam mengurangi angka pasien terinfeksi COVID-19, mulai mengalami penyebaran virus gelombang kedua. Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah antisipatif dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sejak pertengahan Maret 2020 dan mulai pertengahan Juli 2020 berganti nama menjadi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Meskipun begitu, banyak kalangan masyarakat yang masih saja menyayangkan kurang sigapnya dan ada kesan kurang terbukanya Pemerintah Indonesia dalam menyampaikan informasi terkait penanganan COVID-19, khususnya di masa-masa awal ditemukannya kasus positif di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kegelisahan beberapa pihak justru lebih ke arah lambannya penyerapan dana stimulus COVID-19 yang telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, harapan untuk segera keluar dari krisis ini masih sangat terbuka lebar, khususnya melalui upaya koordinasi dan kolaborasi yang optimal dari semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, lembaga penelitian, institusi pendidikan, hingga komunitas masyarakat.

Sebagai lembaga penelitian yang telah sejak 1971 aktif dalam perdebatan publik, baik secara nasional maupun internasional, dan seringkali menjadi sumber referensi bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), khususnya melalui Disaster Management Research Unit (DMRU), mengompilasi beberapa tulisan CSIS Commentaries terkait Indonesia dan COVID-19 yang mengupas tuntas perkembangan upaya penanganan COVID-19 di Indonesia dari berbagai aspek. Dalam buku ini, terdapat sebelas aspek yang dianalisis dalam kaitannya dengan Indonesia dan COVID-19, di antaranya aspek hubungan internasional dan perbandingan politik, kebijakan sektor digital dan pendataan, pertahanan dan tata kelola keamanan, manajemen kebencanaan dan lingkungan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, kebijakan publik dan pemerintahan, hukum dan sejarah, keagamaan dan kebudayaan, perkotaan, serta aspek kelompok rentan dan inklusi sosial.



CSIS Indonesia
Gedung Pakarti Centre
Jl. Tanah Abang III No. 23-27
Jakarta, 10160
T: (021) 3865532
csis.or.id

Cetakan Pertama
ISBN: 9789791295369

